

DAMPAK PEMBATALAN HASIL PEMILU 2 FEBRUARI 2014 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI THAILAND TERHADAP PENYELESIAN KRISIS POLITIK THAILAND (IMPACTS OF CANCELLATION OF FEBRUARY 2, 2014 ELECTION BY THAILAND CONSTITUTIONAL COURT ON THAILAND POLITICAL CRISIS RESOLUTION)

Nadia Sarah Amalia
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: nadiasarahamalia@gmail.com

Abstract

At the time of Prime Minister Yingluck Shinawatra administration, Thailand experienced a political crisis that originated from the opposition refusal to the bill on amnesty. The formulation of Amnesty Bill did not solve the problem, even it led to a new problem. The problem arose from the opposition party that desired to overthrow Prime Minister Yingluck. The opposition had lost trust in Yingluck because the policy of the bill was considered to protect the previous PM Thaksin S. To resolve the political crisis, Prime Minister Yingluck provided a solution to hold election on February 2, 2014. When the results showed that Prime Minister Yingluck won back, then the opposition brought a lawsuit to Court to reject the election results by reasons that the election was not conducted simultaneously, then on March 21, the Constitutional Court decided to cancel the results of February 2 election by unconstitutional grounds. By the cancellation of the results of February 2, 2014 election a wave of demonstrations in Thailand was getting bigger and bigger. Opposition demanded PM Yingluck to immediately step down because it was found that there were many acts of corruption and nepotism to save her sister from the law who were also involved in the earlier cases of corruption.

Keywords: Thailand, elections, democracy consolidation, military intervention.

Pendahuluan

Thailand kembali memasuki krisis baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada tanggal 21 Maret 2014 menyatakan pemilihan umum parlemen pada 2 Februari 2014 tidak sah, (The Wall Street Journal, 2014) sehingga pemilu baru harus segera digelar. Alasan MK untuk membatalkan hasil Pemilu Majelis Rendah Parlemen Thailand tersebut adalah karena tidak dilakukan secara serempak. Akibat dari adanya pengumuman MK ini telah menyebabkan kebuntuan politik

yang kian panjang di Negeri Thailand. Akibat pembatalan hasil pemilu dan rencana pemakzulan Yingluck Shinawatra, krisis politik di negeri Thailand itu semakin mendalam (Koran Sindo, 2014). Rakyat negara Thailand pun semakin terpolarisasi, yakni antara kelas menengah-atas (massa kaus kuning) yang mendukung oposisi dengan warga miskin yang menjadi pendukung setia kelompok Yingluck Shinawatra. Para musuh Yingluck Shinawatra tersebut ingin agar pemimpin negara itu menghadapi pemakzulan (*impeachment*) atas

pembagian beras yang kacau secara finansial. Senat yang di dominasi politikus antipemerintah bisa mempercepat pelengserannya. Pemakzulan Yingluck membutuhkan suara tiga perlima dari senator. Dengan krisis politik Thailand yang memasuki bulan keenam pada tahun 2014, pemilu Senat ini dinilai cukup penting (Koran Sindo, 2014). Pembatalan hasil pemilu pada 2 Februari 2014 menyebabkan Thailand memasuki krisis politik baru dan Yingluck tetap memainkan peran sebagai penguasa sementara dengan kekuasaan terbatas atas pemerintahan hingga pemilu dengan jumlah pemilih yang mencukupi akan membentuk komposisi parlemen yang kuorum. Lembaga pemilihan umum Thailand menyatakan akan butuh setidaknya tiga bulan untuk menggelar pemilu baru, tapi pemilu itu pun tampaknya tidak akan berjalan lancar. Di satu sisi, para pendukung pemerintah menuduh pengadilan dan menyebut banyak hakim yang bersekutu dengan kubu konservatif. Namun di sisi lain para demonstran telah bertekad mengganggu pemilu apa pun yang digelar sebelum perubahan politik terjadi. Pemilu Senat tampaknya memberikan hasil yang sama dengan pemilu 2 Februari 2014 yang dibatalkan itu, artinya pro-pemerintah akan menang (Jawa Pos, 2014).

Krisis politik memasuki tahap baru yang krusial setelah Komisi Anti Korupsi Nasional (*National Anti Corruption-Commission, NACC*) memanggil Yingluck Shinawatra terkait skema

subsidi beras. Badan antikorupsi itu menuduh Yingluck Shinawatra mengabaikan peringatan korupsi dan kerugian finansial dalam kebijakan tersebut. Jika dinyatakan bersalah, Yingluck Shinawatra akan menghadapi pemungutan suara pemakzulan di majelis tinggi yang bisa menyebabkan dirinya dilengserkan sebagai perdana menteri dan dilarang memasuki kancah politik selama lima tahun (Jawa Pos, 2014). Eskalasi represi terhadap perdana menteri untuk mengundurkan diri malah kemudian memperkuat gerakan kubu pro pemerintah pasca pembatalan hasil pemilu Februari lalu oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Konsentrasi pada tanggal 28 Maret 2014 oleh kubu ini di depan gedung Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) dapat dicermati sebagai upaya mereka mendukung pemerintah (Iran Indonesia Radio, 2014).

Sementara itu, para pendukung Yingluck Shinawatra menilai langkah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) terhadap perdana menteri sebagai tindakan pengalihan masalah guna mengeluarkan partai berkuasa pimpinan Yingluck Shinawatra dari kekuasaan. Mereka juga meyakini bahwa pengaruh kubu anti pemerintah di dua lembaga pemerintah ini telah mendorong MK dan NACC lebih condong kepada kubu anti pemerintah. Bahkan kubu pro pemerintah mengancam akan melakukan tindakan lebih dan mengirim surat kepada Sekjen PBB, Ban Ki Moon, terkait hancurnya

demokrasi di negara Thailand oleh kubu anti demokrasi. Anuttama Amornvivat, wakil sekjen partai berkuasa di Thailand dalam suratnya menyebutkan, instabilitas politik terbaru di negara ini telah mengakibatkan kubu anti demokrasi dengan ulahnya mengobarkan bentrokan dan kerusuhan jalanan telah merusak proses demokrasi di Thailand (Iran Indonesia Radio, 2014).

Dari latar belakang tersebut maka tulisan ini akan menganalisis dampak keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu 2 Februari 2014 terhadap penyelesaian krisis politik di Thailand.

Kerangka Pemikiran

Konsep Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai proses penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan mau pun masyarakat politik. Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi (Nugroho, 2010).

Pemerintahan yang sedang mengalami transisi demokrasi seperti Rezim Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dihadapkan dua pilihan. Pertama, menjalani transisi demokrasi dengan tingkat konsolidasi elite yang padu (solid) ke arah satu tujuan tercapainya demokratisasi politik. Kedua, menjalani transisi demokrasi yang berliku-liku dengan tingkat kepaduan elite sangat rapuh, penuh konflik dan gejolak politik massa.

Sedangkan makna transisi demokrasi berarti fase peralihan atau perubahan dari suatu fase tertentu ke fase yang lain yang tak sama dengan fase pertama. Secara kongkrit, transisi demokrasi diartikan sebagai fase peralihan regim politik dari tipe otoriter menuju regim politik pasca otoriter. Menurut Guillermo O’Donnel, masa transisi umumnya ditandai dengan munculnya liberalisasi, yaitu proses pengaktifan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan negara atau pihak ketiga. Dengan demikian, liberalisasi dikaitkan dengan iklim pengembangan kebebasan hak-hak untuk menjalin atau mendapatkan akses politik yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini bisa berarti liberalisasi politik dalam konteks timbulnya pluralisme politik (Nugroho, 2010).

Hal lain mengapa konsolidasi demokrasi perlu dilakukan adalah untuk membangun regim demokratis yang kuat dan melembaga setelah runtuhnya regim otoriter. Setelah regim

otoriter berakhir, situasi politik tidak menentu, fragmentasi sipil, militer frustrasi dan merasa terpojokan atas perannya mendukung regime masa lalu dan norma, aturan dan prosedur (*rule of the game*) baru yang mewakili sistem demokrasi belum terbentuk. Itulah sebabnya konflik-konflik menjadi terbuka dan sulit dikendalikan mengingat penguasa baru belum punya pijakan politik yang bisa absah diterima semua kelompok politik guna melembagakan konflik-konflik politik yang muncul (Nugroho, 2010). Dengan demikian, tahapan berikutnya yang dilakukan penguasa demokratis baru setelah pemerintahan otoriter runtuh adalah dibangunnya regime demokratis yang meliputi nilai, norma dan institusi demokrasi serta pengkonsolidasian regime demokratis baru (Huntington, 1995:45). Asumsi di balik perlunya konsolidasi demokrasi adalah lemahnya kekuatan-kekuatan sipil demokrasi, yang di awal keruntuhan rezim otoriter tercerai-berai akibat pandangan politik yang beragam, mereka berangkat dari kepentingan dan motivasi serta ideologi politik yang juga berbeda. Di samping itu, visi elite menyangkut prioritas kebijakan-kebijakan politik apa yang harus diambil di era transisi belum terbentuk atau kalau pun ada masih cenderung terpolarisasi.

Konsep Militer Dalam Politik

Inti pandangan Huntington sendiri mengelompokkan tentara dalam kerangka hubungan sipil-militer menjadi dua yaitu,

tentara pretorian dan *tentara profesional* (Huntington, 1957:6). Tentara pretorian atau tentara jenis penakluk (*warior*) dalam hal ini mewakili kelompok militer yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan dan menentukan keputusan-keputusan politik. Paham ini tumbuh dan berkembang sebelum abad ke-19 ketika profesi perwira sebagai pengelola kekerasan (*manager of violence*) masih merupakan monopoli para kerabat istana. Munculnya revolusi Perancis 1789, menandai perubahan dari “tentara pencari keuntungan materi” menjadi “tentara karena panggilan suci, misalnya mengabdikan negara”, hal inilah yang kemudian dikemukakan oleh Huntington sebagai awal berkembangnya paham tentara profesional. Sebenarnya pandangan ini tidak saja dinyatakan oleh Huntington, namun jauh sebelumnya seorang ilmuwan Perancis, de Tocqueville telah berbicara tentang “profesi militer” dan “kehormatan militer”.

Huntington juga memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer yang menurutnya memiliki tiga ciri pokok, yaitu (Huntington, 1957:7-18) :

1. Mensyaratkan suatu keahlian, sehingga profesi militer menjadi kian spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan.
2. Seorang militer memiliki tanggung jawab sosial yang khusus, artinya seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi

dan terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tugas pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, dimana seorang perwira seakan-akan menjadi milik pribadi komandan dan harus setia kepadanya sebagai suatu bentuk disiplin mati.

Pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak untuk mengoreksi atasannya, jika si atasan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

3. Karakter korporasi (*corporate character*) para perwira yang melahirkan rasa esprit de corps yang kuat.

Ketiga ciri militer profesional di atas pada akhirnya melahirkan apa yang disebut oleh Huntington "*the military mind*" yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara. Hal ini melahirkan suatu pengakuan akan "Negara Kebangsaan" *Nation State* sebagai suatu bentuk tertinggi organisasi politik. Sehingga inti dari *military mind* adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil. Bagi perwira militer, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi, kecuali kepatuhan kepada negarawan sipil. Jadi menurut Huntington, kaum militer yang melakukan intervensi politik pada hakikatnya menyalahi etik militer profesionalnya.

Bahkan Huntington menganggap intervensi militer dalam politik sebagai tanda adanya *political decay* (pembusukan politik), dan dianggap sebagai suatu kemunduran ke arah "masyarakat pretorian (Huntington, 1983:34).

Kaum militer di negara demikian, bisa saja menentang kelompok ologarki kalangan atas (*upper class*), tapi pada saat yang bersamaan membela kepentingan golongan menengahnya terhadap ancaman dari kalangan bawah (*lower class*) (Nordlinger, 1994:45).

Alasan lainnya yang mencegah kaum militer menjadi reformis adalah tentang sifat-sifat korporasi militer, sehingga kelompok militer adalah suatu kelompok kepentingan yang paling kuat di negara-negara Dunia Ketiga. Demikian pula dengan nilai-nilai militer yang menekankan ketertiban dan stabilisasi, bertentangan dengan semangat reformasi yang memerlukan perubahan yang berkisinambungan.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis data. Deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, atau berapa, jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi (The, 1984:81). Tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, media cetak serta internet yang pada akhirnya menguji argumen

utama tersebut dengan fakta-fakta berdasarkan sumber-sumber yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

Keputusan PM Yingluck untuk mengambil langkah mengadakan pemilu pada 2 Februari 2014 yang bermaksud memberikan jalan dan solusi tengah bagi para oposisi setelah berbulan-bulan Negara Thailand dalam kondisi tidak menentu yang sangat mengganggu perekonomian Thailand umumnya dan Bangkok khususnya, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Langkah pemerintah untuk melaksanakan pemilu tersebut yang mendapatkan pertentangan dari oposisi dengan melakukan boikot pemilu tersebut yang mengakibatkan Pemilu tidak berjalan dengan baik dan berhasil digagalkan oleh kelompok oposisi melalui gugatan pengadilan atas hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Thailand yang kemudian memutuskan bahwa hasil pemilu 2 Februari 2014 adalah tidak sah secara hukum.

Pembatalan hasil pemilu 2 Februari 2014 tersebut membuat Posisi PM Yingluck kemudian semakin terdesak, terlebih setelah itu Lembaga Peradilan Mahkamah Agung Thailand juga melakukan pemanggilan untuk persidangan terhadap Yingluck atas dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh Yingluck dalam menjalankan kebijakan dan pengajuan RUU.

Dalam menganalisa krisis politik yang terjadi di Thailand pada masa Pemerintahan Yingluck Sinawathra, terlebih dahulu melihat krisis legitimasi yang dialami oleh PM Yingluck yang dianggap sudah tidak memiliki legitimasi dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pada tanggal 8 Desember 2013 ketika demonstrasi dan protes besar-besaran oleh kelompok oposisi pimpinan Mantan PM Abhisit Vejjajiva (The New York Times, 2013), anggota parlemen dari partai oposisi ramai-ramai menyatakan mundur dengan alasan bahwa partai pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, Pheu Thai dan pemerintah tidak pernah bertanggung jawab setelah meloloskan RUU Amnesti yang kontroversial. Selain itu langkah pengunduran anggota parlemen dari partai oposisi itu ditempuh dengan tujuan menekankan pada publik Thailand bahwa pemerintahan Yingluck sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu anggotaparlemen Bangkok, Sansern Samalapa, yang menulis di akun Facebooknya bahwa pengunduran diri massal itu dimaksudkan untuk menolak sistem parlemen rezim Thaksin yang tidak lagi memiliki legitimasi. Sebanyak 152 anggota parlemen dari Partai Demokrat resmi mengundurkan diri dan dengan demikian kelompok oposisi berharap dapat mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan membiarkan Pemerintah Yingluck memutuskan

apa yang sebaiknya dilakukan (The New York Times, 2013).

Krisis politik Thailand kemudian mencapai puncaknya dua kali, yakni pada 7 Mei 2014 saat terjadinya kudeta pengadilan oleh MK Thailand atas PM Yingluck Sinawatra (DW,2014), dan pada 22 Mei 2014 saat terjadinya kudeta oleh militer Thailand terhadap pemerintahan sementara oleh wakil PM Niwatthamrong (BBC Indonesia.2014). Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi Thailand beberapa waktu lalu memutuskan pemilihan umum yang digelar pada 2 Februari adalah tidak sah. Selain itu, MK Thailand juga menjatuhkan vonis bersalah atas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam kasus tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan dengan demikian, MK memutuskan bahwa PM Yingluck harus meletakkan jabatannya sebagai PM Thailand pada 7 Mei 2014. Campur tangan pengadilan Thailand ini menguntungkan Partai Demokrat sebagai kelompok oposisi setelah sebelumnya pada bulan Februari, partai itu memboikot penyelenggaraan pemilihan umum setelah sejumlah petinginya memimpin demonstrasi secara masif mendesak pembubaran pemerintah dan membentuk dewan yang terdiri dari para elit pemerintah. Kemudian pada Bulan Maret, Mahkamah Konstitusi tidak mengakui hasil pemilihan umum dengan alasan bahwa pemilu tidak digelar secara serentak di seluruh negeri, meskipun faktanya ini disebabkan oleh boikot

dan upaya pihak oposisi yang menghalau pemilihan ulang.

Demokrasi Thailand memang telah mengalami beberapa krisis dengan terjadinya kudeta militer yang membuat supremasi sipil berada dibawah kendali militer sebagai pihak yang mengontrol jalannya negara. Kudeta militer 22 Mei 2014 juga menandai jatuhnya demokrasi Thailand dimana militer Thailand berhasil merebut dan mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan sipil sementara Wakil PM Niwatthamrong yang menggantikan tugas Perdana Menteri Yingluck Shinawarta yang sebelumnya mengalami kudeta. Rasionalisasi yang digunakan oleh pihak militer adalah bahwa kondisi politik Thailand sudah sangat memprihatinkan dan bisa mengancam keamanan negara jika instabilitas politik dan demonstrasi terjadi terus menerus. Sebagaimana dikatakan oleh Jurgen Habermas, Krisis dalam suatu negara akan menyebabkan hilangnya legitimasi lembaga pemerintahan (Habermas, 1975:67). Seperti pemerintahan Yingluck yang terus menerus dilanda krisis politik dan konflik dengan kelompok oposisi, membuat pemerintahannya mengalami krisis legitimasi.

Konsolidasi demokrasi di Thailand tidak berjalan dengan baik karena campur tangan dan peran Militer yang begitu kuat mengakar dalam Politik negara tersebut. Secara historis, Sejak berakhirnya pemerintahan Monarki absolut pada 1932 menjadi monarki

konstitusional, militer mengambil peran yang sangat besar dalam politik Thailand dimana militer tidak hanya mengurus masalah pertahanan, tetapi juga dimensi keamanan nasional lain yakni stabilitas politik melalui kontrol terhadap aparatur negara yang meliputi aparat kepolisian dan pelayanan sipil (Rakson,2010). Dengan pengaruh besar militer dalam pembuatan kebijakan politik tersebut, perubahan politik dan pelembagaan politik yang demokratis tentunya tidak bisa dijalankan dengan baik oleh kelompok-kelompok sipil atau pun partai politik karena sistem kepartaian di negara Thailand sulit untuk dikatakan institusional.

Sebagai sebuah negara demokrasi konstitusional, Thailand juga menganut sistem pemerintahan melalui pemilihan lembaga perwakilan dan adanya jaminan kebebasan politik bagi warganya atas dasar supremasi sipil. Namun, terjadinya 14 kali kudeta militer (yaitu tahun 1932, 1933, 1947, 1957, 1957, 1958, 1971, 1976, 1977, 1991, 2006, dan 2014) menegaskan bahwa pemerintahan sipil seringkali tidak mampu mengatasi kekerasan politik dan cekcok internal pada diri partai-partai politik (Hawison, 2002:1). Inilah yang menyebabkan perampasan kekuasaan yang dilakukan militer untuk mengakhiri sebuah pemerintahan sipil dengan alasan memulihkan stabilitas politik dan keamanan negara. Kondisi lemahnya kekuatan sipil dan sebaliknya begitu kuatnya pengaruh militer ini membuat

demokrasi Thailand berada pada situasi yang tidak berkembang. Pola berulangnya kudeta militer yang diikuti oleh pemerintahan sementara dan otoritarian (bahkan hingga tahun 2014) menekankan rapuhnya demokrasi di Thailand. Konsolidasi demokrasi di negara tersebut sulit berkembang maju jika kepercayaan kepada demokrasi dari kelompok elit militer masih sangat lemah. Pemerintahan sipil yang cenderung koruptif dan lemah, kurangnya penghormatan atas penegakan hukum yang berujung pada krisis politik dan keamanan akan selalu memaksa militer Thailand untuk mengambil sikap dengan dalih melindungi negara.

Konsolidasi demokrasi Thailand tidak akan berhasil selama elit politik sipil dan militer serta tentu saja rakyat masih belum bisa bersikap baik terhadap demokrasi di negara itu. Pondasi pemerintahan yang kuat ditandai dengan adanya legitimasi yang kuat dan penghormatan terhadap proses demokratisasi, termasuk penghormatan terhadap konstitusi dan institusi politik. Supremasi sipil atas militer dalam arti adanya pembatasan militer dalam politik Thailand mutlak dilakukan. Apabila kekuatan militer tidak berada dalam pengawasan penuh pejabat-pejabat yang terpilih secara demokratis, maka lembaga-lembaga politik demokratis tidak akan mungkin bisa berkembang dan bertahan lama. Aktor-aktor di dalam militer, harus tunduk terhadap pejabat-pejabat yang terpilih secara demokratis.

Dalam sejarahnya, konsolidasi demokrasi di Thailand dalam hal penguatan kewenangan penuh sipil atas pihak militer sudah seringkali dilakukan, seperti pada Tahun 1992 hingga 2006, peran militer dalam politik telah tereduksi dalam perubahan konstitusi (Hawison, 2002:42). Peran militer yang sentral telah bergeser ke arah yang lebih tradisional yakni hanya mengurus pertahanan dan keamanan. Periode tersebut pun dilalui tanpa adanya pemerintahan militer dengan berdasarkan pada Konstitusi Thailand Tahun 1997 yang secara jelas membatasi perwira-perwira aktif militer dalam menduduki posisi pemerintahan atau senat. Namun, konsolidasi demokrasi Thailand tidak disertai dengan komitmen kelompok-kelompok sipil itu sendiri terhadap pilar-pilar demokrasi. Seperti pada masa pemerintahan Thaksin Shinawarta yang dianggap otoriter dimana dominasi kuat Thaksin dalam setiap ruang bisnis dan politik di Thailand, terjadinya krisis ekonomi, kemudian berdampak pada turunnya legitimasi rakyat terhadap pemerintahan Thaksin, terutama oleh kelompok masyarakat kelas menengah. Demikian halnya dengan pemerintahan adik Thaksin, yakni Yingluck Shinawatra yang dianggap koruptif (dengan berusaha menerbitkan RUU Amnesti yang akan melindungi pemulangan Mantan PM Thaksin ke Thailand), juga mengalami krisis ekonomi dan konflik yang tidak terselesaikan dengan oposisi, semakin melemahkan pemerintahan

dan otoritas sipil. Dan pada akhirnya, setelah Yingluck mendapatkan kudeta oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang berujung pada pergantian kendali pemerintahan ke tangan Wakil PM Niwatthamrong, Panglima tertinggi militer, Jendral Prayuth Chan-Ocha akhirnya memutuskan mengambil alih pemerintahan dengan alasan penyelamatan stabilitas negara. Konsolidasi demokrasi di Thailand tidak akan berjalan baik juga karena posisi dan peran Raja Bhumibol Adulyadej yang mendukung tindakan kudeta oleh junta militer. Hal ini membuat militer memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan kebijakan militeristik dan pemerintahan otoriter.

Kesimpulan

Keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand dalam membatalkan hasil pemilu tanggal 2 Februari 2014 menyebabkan gejolak politik yang besar dalam dinamika politik Thailand. Puncaknya ketika tanggal 7 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi Thailand mencopot Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dari kursinya beserta 9 anggota kabinetnya yang lain. Setelah dicopotnya Yingluck Shinawatra, kursi Perdana Menteri Thailand dilanjutkan oleh Niwatthamrong Bongsophaisan. Namun Niwatthamrong Bongsophaisan belum bisa menjalankan roda pemerintahan secara efektif, dan akhirnya pada 22 Mei 2014 di Thailand kembali terjadi kudeta oleh pihak Militer. Kudeta ini juga mengangkat

Panglima militer Thailand, Prayuth Chan-ocha sebagai Perdana Menteri sementara Thailand Prayuth Chan-ocha menerima penunjukan resmi dari kerajaan untuk menjalankan pemerintahan.

Rezim hasil kudeta itu menerapkan kontrol yang ketat terhadap aktivitas publik. Rezim junta militer Thailand tidak hanya berhenti pada pemblokiran media, namun berlanjut sampai pembubaran parlemen dan membentuk sendiri badan legislatif. Langkah militer ini makin mendapatkan kecaman dari dunia internasional dan kudeta militer ini dinilai sebagai langkah melanggar hak asasi manusia yang mencederai demokrasi.

Meskipun militer dan pemerintah mengerahkan diri melalui gagasan kontribusi konsolidasi demokrasi untuk menghindari kekerasan lebih lanjut dan hilangnya nyawa, masih sulit untuk menjembatani kesenjangan antara pendukung Yingluck dan pemerintah Thailand. Negara bergerak menuju skenario terburuk dengan kasus kekerasan yang berkepanjangan, stabilitas keseluruhan sistem politik Thailand saat ini telah berada di tingkat rendah pasca kudeta. Masih perlu waktu dan kesabaran serta kerja sama antara pemerintah dan militer untuk dapat menciptakan resolusi konflik politik dan demokrasi yang stabil pada saat ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Habermas, Jurgen. 1975. *Legitimation Crisis*. New York: Beacon Press.
- Hawison, Kevin. 2002. *Political Change In Thailand*. New York: Routledge.
- Huntington, Samuel P. 1957. *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*. Cambridge: Harvard University Press.
- Huntington, Samuel P. 1983. *Tertib Politik dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Nordlinger, Eric A. 1994. *Militer Dalam Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- The Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan dan Metodologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Jurnal dan Working Paper

- Nugroho, Kris. "Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*. Volume 14, Nomor 2:25-34 2010. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Rakson, Katsamaporn. "The influence of the military in Thai politics since the 1990s". Working Paper No.166. 2010. Deakin University. Australia.

Surat Kabar

- Jawa Pos. Sabtu, 22 Maret 2014. *Pemilu Thailand Tidak Sah*.
- Jawa Pos. Jum'at, 9 Mei 2014. *Nasib Yingluck Kian Terpuruk*.
- Koran Sindo. 2014. *Konflik Politik Thailand - Mahkamah Konstitusi Anulir Pemilu*. Diakses dari: <http://m.koran-sindo.com/node/376818> [15 April 2014].

Koran Sindo. 2014. *Thailand Gelar Pemilu Senat - Nasib Yingluck Ditentukan Hari Ini.* Diakses dari: <http://koran-sindo.com/node/378816> [15 April 2014].

Internet

BBC Indonesia. 2014. *Kudeta Militer di Thailand.* Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/05/140522_thailand_darurat [3 Agustus 2014].

DW. 2014. *Kudeta Pengadilan Atas Yingluck.* Diakses dari <http://www.dw.de/kudeta-pengadilan-atas-yingluck/a-17617133> [3 Agustus 2014].

Iran Indonesian Radio. 2014. *Gejolak Politik dan Ancaman Disintegrasi di Thailand.* Diakses dari: [http://indonesian.ws.irib.ir/editorial/fokus/item/78557-Gejolak Politik dan Ancaman Disintegrasi di Thailand](http://indonesian.ws.irib.ir/editorial/fokus/item/78557-Gejolak-Politik-dan-Ancaman-Disintegrasi-di-Thailand) [17 April 2014].

The Wall Street Journal. 2014. *Mahkamah Thailand Batalkan Hasil Pemilu.* Diakses dari: <http://indo.wsj.com/posts/2014/03/21/mahkamah-thailand-batalkan-hasil-pemilu/> [15 April 2014].

The New York Times. 2013. *Thomas Fuller "Protests Continue in Thailand After Election Is Set".* Diakses dari: http://www.nytimes.com/2013/12/10/world/asia/thailand-protests.html?_r=0 [18 Mei 2014].